

EDISI : Selasa, 14 Mei 201

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Pemilu*

12 Penyelenggara Pemilu Sakit, Satu Meninggal

Suika Diduga Sakit Jantung

Singaraja (Bali Post) -

Setelah tahapan pencoblosan dan penghitungan suara pemilu serentak 17 April 2019 lalu, 12 orang penyelenggara pemilu di Buleleng jatuh sakit. Bahkan, satu orang penyelenggara pada 11 Mei 2019 lalu meninggal dunia. Apa penyebab serangan jantung setelah menyelesaikan tugas-tugas secara maraton dari penghitungan sampai penghitungan suara pada pemilu serentak itu.

Informasi yang dikumpulkan di Sekretariat KPU Buleleng, Senin (13/5) kemarin, penyelenggara pemilu yang meninggal dunia itu adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) 10 Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Ketut Putu Suika (38). Putu Suika meninggal dunia secara tiba-tiba 11 Mei 2019 lalu. Putu Suika mengembuskan napas terakhir di rumahnya. Hingga meninggalnya, Putu Suika tidak pernah dirawat di rumah sakit. Kepergiannya dengan cara mendadak itu membuat istri, anak, dan keluarga dekatnya terpukul. Pihak keluarga memperkirakan Putu Suika meninggal dunia karena penyakit jantung.

Selain KPPS 10 Desa Pegadungan, Sekretariat KPU Buleleng juga menerima laporan 12 orang penyelenggara pemilu jatuh sakit setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan. Dari belasan penyelenggara itu, ada yang menjalani rawat jalan. Beberapa orang lainnya operasi di rumah sakit karena menjalani operasi untuk menyembuhkan penyakit yang diidapnya.

Komisioner KPU Buleleng Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan SDM Gede Bandem Samudra mengatakan, Ketua PPS 10 Desa Pegadungan diketahui meninggal dunia setelah ada anggota PPS yang melaporkan kejadian itu

ke Sekretariat KPU. Setelah ditindaklanjuti memang benar KPPS Desa Pegadungan itu meninggal dunia secara mendadak. Mengetahui kejadian itu, pihaknya kemudian mengumpulkan data dan kronologis kematian almarhum. Dari penelusuran rekan sesama penyelenggara dan informasi keluarga menyebutkan, Rabu (17/4) dan Kamis (18/4) almarhum masih melaksanakan tugas-tugasnya. Hanya, waktu itu, almarhum sempat mengaku kelelahan kepada sesama rekannya. Atas kondisi itu, keluarganya sempat mengantar almarhum memeriksakan kesehatannya ke tempat praktik bidan Desa Pegadungan. Almarhum sempat minum obat

karena hasil diagnosis kesehatannya menurun karena faktor kelelahan.

Setelah sekitar satu bulan pascapencoblosan, almarhum meninggal dengan tiba-tiba. Keluarganya *shock* dan tidak kuasa menahan kesedihan karena, almarhum tidak pernah memiliki riwayat menderita suatu penyakit, tetapi dalam usia yang terbilang masih muda itu, harus pergi selama-lamanya. "Sebelum meninggal, almarhum tetap bertugas. Waktu itu sempat mengeluh kelelahan dan rekan sesama PPS melihat kalau almarhum seperti tidak sehat. Hanya periksa ke bidan desa. Kemudian Sabtu (11/5), kami mendapat kabar kalau dia (almarhum) meninggal dunia. Kami turut prihatin dan berduka atas kematian rekan sesama penyelenggara pemilu di tingkat desa," katanya.

Terkait meninggal karena beban berat tugas sebagai PPS,

Bandem tidak bisa memastikan hal tersebut. Ini karena Putu Suika dilaporkan meninggal dunia setelah pencoblosan dan penghitungan suara pemilu tuntas sekitar satu bulan. Namun, pihaknya tidak menampik kalau kesehatan almarhum sempat menurun bisa saja karena tenaganya diforsir saat agenda pencoblosan dan penghitungan suara. Hal itu bisa jadi memicu munculnya penyakit.

Meski demikian, sebagai wujud simpati dan pengabdian atas jasanya, KPU Buleleng secara resmi mengusulkan santunan untuk keluarga almarhum. Permohonan ini diajukan ke KPU Pusat bersamaan usulan santunan untuk belasan orang penyelenggara yang sekarang sedang jatuh sakit. Hanya, nilai dan kapan usulan santunan itu disetujui, Bandem mengaku masih menunggu keputusan resmi KPU Pusat di Jakarta. (kmb38)

Nama Media : **BALI POST**

Kategori : **RANPERDA**

Sidang Paripurna Dewan Diwarnai Interupsi

Ranperda Retribusi Kesehatan Disetujui,

BPR Bank Buleleng 45 Ditunda

DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan eksekutif. Sidang diwarnai interupsi karena pihak eksekutif menghadirkan hanya beberapa pejabat terkait yang membidangi ranperda yang sedang dibahas. DPRD meminta kejadian ini sebagai catatan penting pada sidang paripurna agenda tertinggi dalam sidang dewan. Mengapa sampai ada kasus seperti itu, pejabat yang ditunjuk Bupati justru tidak hadir pada sidang terhormat paripurna dewan itu?

SIDANG Paripurna Dewan, Senin (13/5) kemarin, dipimpin Ketua DPRD Gede Supriatna. Ikut mendampingi Wakil Ketua Ketut Wiršana, Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewa Ketut Manuaba, dan anggota tim pakar DPRD. Sementara, eksekutif dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Made Arya Sukerta, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr. IGN Mahapramana, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Desa Putu Rupadi, dan Direktur PD BPR Bank Buleleng 45 Nyoman Suarjaya. Pimpinan OPD ini membidangi dari rancangan perda yang dibahas. Sedangkan, pejabat yang ditunjuk mewakili bupati justru tidak hadir dalam persidangan kemarin.

Atas situasi itu, anggota dewan langsung interupsi. Dewan mempertanyakan ketidakhadiran pejabat yang seharusnya mewakili Bupati

itu. Interupsi itu disampaikan anggota Komisi III Putu Tirta Adnyana. Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan ketidakhadiran pejabat yang mewakili Bupati. Dia menilai ketidakhadiran pejabat itu kurang tepat karena sidang paripurna adalah forum tertinggi agenda sidang. Seharusnya, sidang ini dihadiri pejabat yang ditunjuk Bupati.

"Sidang ini dipimpin Ketua Dewan dan Wakil Ketua, dan Kesekretariatan. Mungkin eksekutif ditunjuk pejabat yang tepat, misalnya Sekretaris Daerah (Sekda)," ujarnya.

Kasus ini merupakan catatan penting agar citra lembaga dewan juga diperhatikan apalagi ketika menggelar sidang paripurna. Bukan bermaksud tidak menghormati pimpinan OPD terkait perda yang dibahas ini.

Mendapat interupsi itu, pimpinan sidang Gede Supriatna menanggapi dengan mengingatkan agar pada agenda sidang paripurna ini selanjutnya pejabat yang

ditugaskan bupati itu memang harus hadir dalam sidang. Selain itu, Supriatna mengaku, perubahan agenda sidang paripurna ini sesuai regulasi terbaru. Agenda pembahasan rancangan perda itu diawali forum paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

Agenda berikutnya paripurna diawali laporan panitia khusus (pansus) dan terakhir permohonan pengesahan perda kepada pimpinan

DPRD. Setiap agenda sidang paripurna itu pihak eksekutif dihadiri Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. "Jadi, sudah dua kali pembahasan ranperda mengikuti regulasi terbaru. Harusnya perubahan mekanisme persidangan ini diketahui bersama, tetapi mungkin lupa. Saran anggota kita tadi kami tidak lanjut agar diperhatikan dalam sidang paripurna berikutnya," jelasnya.

Dalam sidang paripurna kemarin, dua ranperda yaitu

Nama Media :

Kategori : *SAN BAWUAN*

tentang retribusi pelayanan kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan disetujui agar disahkan menjadi perda. Sedangkan, satu ranperda lagi tentang PT PD BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) pengesahannya ditunda. Pendapat politik fraksi itu disampaikan juru bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra Ni Luh Sri Seniwi. Selain itu, jubir Fraksi Partai Golkar Nyoman

Gede Wandira Adi, Fraksi Partai Demokrat Made Mangku Ariawan dan jubir Fraksi Partai NasDem Ni Made Indrawati. Satu pertimbangan mengapa menunda mengesahkan ranperda itu karena, eksekutif belum melengkapi rancangan perda dengan naskah akademik (NA). Sikap fraksi ini sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut naskah akademik diperlukan untuk melandasi pembahasan rancangan perda

PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Direktur PD BPR Bank Buleleng 45 Nyoman Suarjaya mengatakan, sejak awal pembahasannya tidak mengetahui secara pasti terkait urgensi naskah akademik tersebut. Saat itu, dirinya menyusun draf rancangan perda dengan materi berkaitan usaha yang dipimpinnya. Hanya, masalah aspek materi hukum dalam rancangan itu diserahkan kepada tim penyusun Bagian Hukum Sekkab Buleleng. Sementara, terkait perubahan PD menjadi Perseroda, pihaknya menilai kalau saja tidak diamanatkan regulasi yang lebih tinggi, sehingga perubahan PD menjadi Perseroda itu sebenarnya tidak terlalu urgen. Sehingga cukup diatur dengan perda lama tentang PD BPR Bank Buleleng 45.

"Waktu itu, kami tidak tahu harus ada naskah akademik. Kami siapkan materi berkaitan dengan usahanya saja. Kalau masalah urgensi perubahan, kalau saja tidak diatur regulasi di atasnya, kami kira dengan status sekarang saja sudah cukup dalam membentuk PD," katanya.

Terkait keputusan dewan menunda rancangan perda, Suarjaya mengaku akan berusaha melengkapi naskah akademik yang diwajibkan itu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dua perguruan tinggi di Buleleng sebelum nantinya penyusunan naskah akademik ini disusun berdasarkan kerja sama dengan institusi pendidikan yang dipilih. (mud)



Nama Media :

BALI POST

Kategori :

SATLANTAS

Polisi Bubarkan Konvoi Pascakelulusan SMA/SMK

Singaraja (Bali Post) –

Konvoi kendaraan di jalan raya dan aksi corat-coret seragam masih dilakukan siswa SMA dan SMK yang sudah dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN). Sejumlah lokasi di Kota Singaraja pun dijadikan tempat mangkal para siswa untuk mengabadikan masa SMA tersebut. Tak ingin menimbulkan gangguan kamtibmas dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya, anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng membubarkan konvoi dan aksi corat seragam siswa SMA dan SMK, Senin (13/5) kemarin.

Mengantisipasi terjadinya aksi tawuran sesama pelajar dan juga mencegah gangguan kamtibmas serta menjaga kenyamanan keselamatan berkendara, pihaknya pun melakukan langkah persuasif. Solusinya, aksi konvoi anak-anak sekolah pascakelulusannya itu kemudian dibubarkan.

Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, upaya pembubaran itu dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pada hari pengumuman kelulusan UN jenjang SMA dan SMK. Untuk itu, pihaknya menerjunkan anggotanya di sejumlah lokasi. Selain itu, anggota unit lantas di masing-masing Polsek juga diinstruksikan mengatensi secara dini aksi konvoi kelulusan siswa tersebut.

Dari pemantauan di lapangan, AKP Kurniawandari menyebut di beberapa lokasi di Kota Singaraja itu, ditemukan gerombolan siswa SMA dan SMK yang merayakan pascakelulusan mereka. Salah satu lokasi pertemuan beberapa kelom-

pok siswa itu dilakukan di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Bhuana Patra Jalan Udayana, Singaraja.

Para siswa baik wanita maupun laki-laki bahkan ditemukan mengenakan seragam sekolah dalam kondisi penuh coretan dari cat semprot. Selain itu, para siswa ini juga ditemukan berkendara tanpa menggunakan helm. Selain itu kendaraannya menggunakan knalpot brong.

"Anggota kami sebar. Mereka memantau pergerakan konvoi kelulusan. Dari beberapa lokasi kami temukan siswa merayakan kelulusan dengan berkonvoi di jalan. Bahkan, anak-anak itu ada yang tidak menggunakan helm," katanya.

Mengantisipasi aksi tawuran sesama pelajar dan juga mencegah gangguan kamtibmas serta kenyamanan keselamatan berkendara, pihaknya pun melakukan langkah persuasif. Solusinya, aksi konvoi anak-anak sekolah pascakelulusannya dibubarkan. Setelah diberikan pemahaman, para siswa pun bersedia dan legowo bubar. Kemudian mereka disarankan melakukan aksi-aksi yang konstruktif dan lebih bermanfaat untuk merayakan kelulusan sekaligus membuat kenangan setelah mengakhiri masa duduk di bangku SMA maupun SMK.

"Kami sarankan anak-anak sekolah itu tidak terlalu larut euforia kelulusan. Apalagi melakukan aksi konvoi di jalanan. Hal itu berpotensi menimbulkan gangguan berlalu lintas. Bahkan bisa memicu aksi tawuran. Untuk mengantisipasi, anggota kemudian melakukan atensi dengan membubarkan aksi siswa SMA itu," jelasnya. (kmb38)



Bali Post/ist

KONVOI SISWA DIBUBARKAN – Meskipun sudah dilarang, namun siswa SMA dan SMK di Buleleng melakukan konvoi dan melakukan aksi corat seragam dengan cat semprot Senin (13/5) kemarin. Tidak ingin aksi ini memicu gangguan kamtibmas dan gangguan lalu lintas, polisi membubarkan aksi tersebut.

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pengelolaan Aset

Komisi I DPRD Dalam HGB

Tanah di Desa Pancasari

Singaraja (Bali Post) -

Komisi I DPRD Buleleng menindaklanjuti pengelolaan tanah di tepi Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada. Tanah itu disebut-sebut statusnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis masa berlakunya. Untuk mengetahui status aset itu perlu bukti hukum dan juga dari hasil pengelolaan aset pemerintah tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa mengungkapkan hal itu usai sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng Senin

(13/5) kemarin.

Kader PDI Perjuangan asal Desa Banjar, Kecamatan Banjar ini mengatakan, selama ini dewan tidak memiliki data teknis terkait seperti apa skema pengelolaan tanah tersebut oleh pihak pemegang izin HGB. Selain itu, sejak pihaknya duduk di kursi dewan, belum pernah ada agenda yang membahas terkait pengelolaan kekayaan milik pemerintah tersebut.

Dari kondisi itu, dalam masa sidang dua ini, Komisi I menelusuri skema pengelolaan tanah yang disebut-sebut

tanah itu ditelantarkan. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mengundang Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai institusi yang ditugaskan menangani tentang aset pemerintah.

"Bagaimana sesungguhnya mekanisme pengelolaan tanah itu. Data konkret terkait yang mendasari pengelolaan sampai sekarang perpanjangan izin HGB yang tidak disetujui itu kita tidak punya. Karena itu, kami sedang dalam persoalan tanah HGB itu," katanya.

Perpanjangan izin HGB

yang tidak disetujui pemerintah itu kata Mertayasa, adalah kesempatan baik bagi pemerintah agar pengelolaan tanah itu mendatangkan keuntungan. Sudah pasti tanah itu nantinya berfungsi optimal dalam menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, pihaknya mendorong penuh pemerintah daerah yang bermaksud memohon pengelolaan tanah tersebut. Tidak saja pemerintah, pihaknya menganggap wajar kalau belakangan ini malah Pemerintahan Desa Pancasari juga mengajukan usulan memohon

sebagai pengelola tanah itu.

"Hemat kami, pemerintah memohon tanah sebagai aset karena lokasinya di daerah kita. Kalau desa juga turut mengusulkan permohonan itu, kami kira hal itu wajar. Sekarang, kalau status aset itu belum terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) BKD, maka kita dorong buat permohonan lebih dulu. Kalau sudah dialihkan, tentu kami akan kawal. Sebab, regulasi mengamanatkan pengelolaan aset itu atas persetujuan DPRD," tegasnya. (kmb38)